

Kuasa Patronase dan Klientelisme Kepala Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor Pada Pilkada Serentak Kabupaten Bogor Tahun 2018.

Ranti Meidita Lestari

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Rantimeidita1199@gmail.com

ABSTRACT

The practice of patronage politics and clientelism is still very much present in the political dynamics in Indonesia, even at the village level. This practice is usually marked by the control of political resources by a number of elites, especially the state elite. One of the practices of patronage and clientelism occurred during the simultaneous regional elections of Bogor Regency 2018. In which the success team of one of the candidates for the Bogor Regent used the Head of Gunung Picung Village, who is a local strongman in the area, to mobilize the masses in Gunung Picung Village to choose one of the candidates for the Bogor Regent. This patronage must be distributed through clientelism networks such as the success team that had been prepared long before the election which then consolidated with the Village Head to win the candidate for Regent. Then the relationship that occurs in the community, the Village Head mobilizes votes through money politics. From this it can also be said that the Village Head is making hegemonic efforts to the community through money politics. Money politics has given influence, awareness and interests of voters in determining their choices.

Keywords: Patronage, Clientelism, Local Strongman, Pilkada, Hegemony

LATAR BELAKANG

Pembangunan demokrasi politik di tingkat lokal adalah salah satu prioritas pemerintahan reformasi saat ini, kebijakan otonomi daerah yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, membuktikan bahwa pemerintahan Pasca Orde Baru serius melakukan penataan ulang sistem politik di Indonesia. Menurut Leo Agustino, melalui pilkada, merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi di tingkat lokal. Pilkada serentak pada tahun 2018 telah dilaksanakan, sebanyak 171 daerah berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Tip O'Neill menyatakan bahwa, "*all politics is local*" yang dapat diartikan sebagai demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh berkembang dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dulu. Ini berarti kebangkitan demokrasi politik di Indonesia diawali dengan Pilkada langsung, karena pilkada termasuk upaya membangun pondasi demokrasi di aras lokal.

Banyak ahli mengungkapkan bahwa ada efektivitas politik uang. Di Argentina misalnya, aktor politik banyak menggunakan cara-cara politik uang untuk mendapat

atensi publik terutama pada golongan kelas menengah ke bawah. Mereka menyimpulkan bahwa pendukung aktor politik cenderung bergantung pada tawaran yang bersifat material dan memiliki sifat yang kurang loyal. Hal ini juga berakibat pada aktor politik yang hanya berfokus pada mendapat suara dan mencapai kemenangan. Tetapi mereka tidak menawarkan kebijakan yang programatik dan tidak memahami bagaimana operasionalisasi representasi politik dan demokrasi (Fukuyama, 2012).

Saat ini, pemilihan kepala daerah berlogika: bagaimana para kandidat kepala daerah mampu mempengaruhi dan merebut hati masyarakat. Karenanya, ada beberapa hal yang baru dalam Pilkada yang diselenggarakan di Indonesia saat ini, selain kejelasannya mengenai ke-'langsung'-an pemilihan itu sendiri atau kebaruan akan arena permainan. Dibandingkan dengan pemiliha kepala daerah pada era-era sebelumnya, arena permainan sekarang berubah dari 'Politik Dalam Ruang' menjadi 'Politik Luar Ruang'. Ada beberapa hal yang menjadi pertarungan 'Politik Luar Ruang'. *Pertama*, pertarungan mengenai munculnya politik uang. Persoalan ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, tetapi terjadi juga di negara-negara maju. Masalah politik uang hadir ketika pemilih menukarkan pilihannya dengan sejumlah uang dan/atau barang dari kandidat dan/atau partai untuk memilih calon kepala daerah. Seperti hal yang terjadi pada Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Bogor. Salah satu calon Bupati Bogor melakukan strategi 'Vote Buying' dan tak lupa, praktik patronase dan klientelisme pun dilakukan.

Oman, Kepala Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, merupakan tuan tanah dan pengusaha toko bangunan yang memiliki tiga cabang di Desa Gunung Picung. Selain itu ada beberapa usaha lain yang dijalankannya, yaitu ternak ayam, ternak ikan, perkebunan, dan penjualan batu alam. Dengan kekuatan dalam bidang ekonomi, Oman dapat menjabat sebagai Kepala Desa dengan mengalahkan calon lain yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi dibanding beliau. Kekuatan dalam bidang ekonomi yang dimilikinya, membuat Oman mudah dalam menjalani kehidupan sosial di Desa Gunung Picung. Terlebih lagi, beliau merupakan orang nomor satu di Desa Gunung Picung ini. Dengan latar belakang ekonomi yang mumpuni dan jabatan yang tinggi, membuat Oman dipercaya dapat mempengaruhi tindakan politik masyarakat Desa Gunung Picung untuk memilih salah satu calon Bupati Bogor pada Pilkada serentak tahun 2018.

AY, calon Bupati Bogor yang merupakan saudara kandung dari Bupati Bogor yang saat ini menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Sepak terjang AY di bidang politik sudah tidak diragukan lagi. Beliau pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor selama dua periode. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya di DPRD, AY memulai karir politiknya yang baru sebagai calon Bupati pada Pilkada tahun 2018. Selanjutnya, karena merasa khawatir dengan jumlah suara yang diperoleh pada saat hari penghitungan suara, tim suksesnya dari AY mengunjungi Oman, Kepala Desa Gunung Picung yang merupakan orang kuat lokal di daerah tersebut. Oman

dipercaya dapat membantu mendongkrak suara di Desa Gunung Picung. Dengan latar belakang ekonomi yang mumpuni dan jabatan yang tinggi, membuat Oman dipercaya dapat mempengaruhi tindakan politik masyarakat Desa Gunung Picung untuk memilih salah satu calon Bupati Bogor pada Pilkada serentak tahun 2018, yaitu AY.

Kemudian pada praktiknya, Oman melakukan pola persuasi menggunakan teknik *'Vote Buying'*. Hal tersebut pun dilakukan oleh kepala desa, dan lagi-lagi beliau mempengaruhi dan menguasai hak politik warga desa, yang kebanyakan adalah warga yang buta politik serta mempunyai kemampuan ekonomi yang lemah, dan tak lupa beliau mempengaruhi warga dengan praktik politik uang. Sehingga, dengan mudahnya kepala desa tersebut dapat mempengaruhi hak politik warga. Mengutip salah satu argumen Migdal tentang *local strongman*, "Orang kuat lokal melakukan kontrol sosial dengan menyertakan beberapa komponen penting yang dinamakan "strategi bertahan hidup" penduduk setempat. Dengan kondisi seperti itu, orang kuat lokal bukan saja memiliki legitimasi dan memperoleh banyak dukungan di antara penduduk lokal, tetapi juga hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan para pemilih atas jasa yang diberikan".

Literatur mengenai perilaku pemilih di Indonesia, banyak ditulis dalam berbagai perspektif misalnya saja melaalui perspektif sosiologis, rational choice (ekonomi-politik) hingga model psikologis. Namun dengan begitu, wacana mengenai money politic banyak terkait langsung dengan mobilisasi finansial dalam tingkatan elit. Masalah mengenai jual beli suara semakin sulit dihindari dikarenakan payung hukum dan mekanisme penegakan hukum di Indonesia dilakukan tidak pada jalurnya. Misalnya saja mekanisme pembuktian tuduhan jual beli suara hanya dapat dilakukan dalam tenggat waktu 3 hari. Hal tersebut tentu menyurutkan pembuktian di tingkat akar rumput karena biasanya kegiatan jual beli politik banyak dilakukan secara terselubung dan butuh waktu lebih lama untuk melakukan pembuktian (Perludem, 2011).

Mengenai pengaruh Kepala Desa terhadap tindakan politik warga Desa Gunung Picung, hal ini berseberangan dengan diaturnya hak politik individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhan haknya oleh Negara. ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Dari ketentuan tersebut, warga negara telah dijamin hak individunya untuk turut berpartisipasi dalam berbagai macam bentuk pemilihan dari tingkatan nasional hingga desa untuk menggunakan hak pilihnya tanpa adanya intervensi dalam bentuk apa pun, seperti intervensi dalam bentuk klientilisme dan patronase.

STUDI PUSTAKA

Hegemoni

Praktik politik uang yang diproduksi oleh sistem patronase, melahirkan budaya hegemoni yang dilakukan oleh *local strongmen* terhadap masyarakat. Menurut Antonio Gramsci, dominasi kekuasaan bukanlah sebuah hegemoni melainkan sebuah

kesepakatan yang dibangun atas persetujuan kepemimpinan politik dan ideologis. Pemaknaan hegemoni oleh Gramsci direstrukturisasi, yang awalnya hegemoni merupakan sebuah strategi menjadi sebuah konsep. Dalam hal ini, seperti perkembangan gagasan marxisme tentang kekuatan relasi produksi, kelas dan negara menjadi sebuah sarana untuk dapat memahami masyarakat dan melakukan perubahan terhadap relasi produksi tersebut.

Gramsci, mengembangkan gagasan mengenai kepemimpinan dan pelaksanaannya sebagai syarat untuk memperoleh kekuasaan negara kedalam konsep hegemoni, hegemoni merupakan hubungan antara kelas dengan kekuatan sosial lain. Kelas hegemonik adalah kelas yang mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan ideologis.

Patronase (patron-klien)

Patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja, atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka. Sementara klientelisme adalah jaringan antara orang-orang yang mempunyai ikatan sosial, ekonomi, dan politik yang didalamnya mengandung elemen iterasi, *status inequality*, dan resiprokal. Maka dapat dipastikan bahwa klientelisme berbicara mengenai jaringan atau relasi. James Scott dalam karya tulisnya tentang *Patron-Client Politics and Change in Southeast Asia* mengemukakan bahwa, hubungan patron dan klien merupakan hubungan pertukaran antara dua pihak. Hubungan ini didefinisikan sebagai kepedulian khusus antara dua orang yang terkait dalam persahabatan instrumental, di mana yang berstatus tinggi dalam bidang sosial-ekonomi (patron), memberikan perlindungan dan keuntungan untuk orang yang berstatus lebih rendah dari patron, yang telah memberikan jasa dan pelayanan."

Praktik ini biasanya ditandai dengan adanya penguasaan sumberdaya politik oleh minoritas elit, terutama elit negara. Pada saat yang sama, tampak ketergantungan klien terhadap sumberdaya tersebut. Alokasi dan distribusi berbagai sumberdaya publik dikerahkan dalam bentuk pertukaran antara kedermawanan sang patron dengan loyalitas politik sang klien. Salah satu praktik patronase dan klientelisme terjadi saat Pilkada serentak Kabupaten Bogor 2018. Yang mana tim sukses salah satu Calon Bupati Bogor memanfaatkan Kepala Desa Gunung Picung yang merupakan *local strongmen* di daerah tersebut, untuk memobilisasi massa di Desa Gunung Picung agar memilih salah satu calon Bupati Bogor. Patronase ini pastinya didistribusikan melalui jaringan klientelisme seperti tim sukses yang telah dipersiapkan jauh sebelum pemilihan yang kemudian melakukan konsolidasi dengan Kepala Desa untuk memenangkan calon Bupati tersebut. Kemudian hubungan yang dibangun di masyarakat oleh Kepala Desa yaitu mobilisasi suara melalui politik uang.

Strategi tersebut merupakan cara untuk mendapatkan dukungan atau suara dengan cara tim sukses menjadi prantara untuk memobilisasasi suara di masyarakat. Dari sini juga dapat dikatakan bahwa Kepala Desa melakukan upaya hegemoni kepada masyarakat melalui politik uang. Politik uang telah memberi pengaruh, kesadaran dan kepentingan pemilih dalam alternatif tawaran kepemimpinan politik. Politik uang yang diproduksi oleh sistem patronase dalam politik telah menciptakan hegemoni budaya yang menyuburkan bias politik, membobrokan rasionalitas pilihan masyarakat, dan menghancurkan citra masyarakat yang memilih berdasarkan *rational choice*.

Local Strongman

Posisi Kepala Desa yang sentral sebagai *local strongmen* di Desa Gunung Picung ini sangat berpengaruh terhadap tindakan politik warga masyarakat Desa Gunung Picung. *Local Strongmen* adalah tokoh yang identik dengan kemampuan dan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Kemunculan *local strongmen* sebagai salah satu sumber kekuasaan yang dimiliki diantaranya adalah kekayaan yang dimiliki sebagai tuan tanah atau orang kaya. Dari sisi tersebut *local strongmen* dipandang sebagai bos ekonomi, *local strongmen* memiliki kecenderungan mereka untuk menjadi investor Pilkada pada akhirnya dapat mempengaruhi proses desentralisasi yang terjadi di level lokal. Sebab memiliki pengaruh yang kuat, Kepala Desa Gunung Picung sebagai *local strongmen* di Desa Gunung Picung, beliau melakukan praktik politik uang untuk menghegemoni masyarakat sebagai hasil dari praktik patronase dan klientalisme.

Joel S. Migdal menjelaskan sejarah kemunculan *Local Strongman* salah satu yang dapat dijadikan rujukan ialah terkait sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki. Beberapa diantaranya seperti kekayaan materi sebagai tuan tanah. Sumber kekuatan tersebut kemudian menjadikan *Local Strongman* dapat melakukan control sosial terhadap kehidupan masyarakat. Migdal kemudian memberikan pendekatan untuk dapat memahami pola dan struktur dari perkembangan *local Strongman*.

Pertama, orang kuat lokal berkembang dalam masyarakat membentuk sebuah jaringan yang disebut campuran organisasi sosial yang hampir independen dengan kontrol sosial terbagi yang efektif. Dikatakan bahwa pola khusus dari kontrol sosial yang terfragmentasi ini sering menyatu dengan pemerintahan kolonial dan integrasi ke dalam kuburan kelas tuan tanah. Singkatnya, berkat struktur jaringan masyarakat, orang-orang berpengaruh lokal telah memperoleh pengaruh signifikan jauh melampaui pengaruh para pemimpin negara dan birokrat lokal, yang oleh Migdal disebut sebagai "segitiga koordinasi".

Kedua, orang kuat lokal melakukan kontrol sosial dengan memasukkan beberapa elemen penting yang disebut sebagai strategi bertahan penduduk lokal. Dalam keadaan seperti ini, orang kuat tidak hanya sah dan mendapatkan banyak dukungan dari penduduk lokal, tetapi juga ada untuk memenuhi kebutuhan dasar dan

tuntutan pemilih atas layanan yang telah diberikan kepada masyarakat oleh orang kuat lokal. Para penulis yang diilhami Migdal cenderung mengungkapkan argumen mereka dalam istilah "kepribadian", "pelanggan", dan "hubungan pelanggan ke pelanggan". Belakangan, pola ini muncul karena penggunaan orang kuat lokal sebagai sponsor yang memberikan keuntungan pribadi kepada kesulitan pelanggan dan pendukung di wilayah hukum.

Ketiga, keberhasilan pemimpin daerah dalam menaklukkan lembaga dan sumber daya negara menghambat atau menoleransi upaya pemimpin negara untuk melaksanakan berbagai kebijakan. Pemimpin lokal membatasi otonomi dan efisiensi nasional, melemahkan negara, dan "meningkatkan kecemasan dan gejolak dalam mencapai tujuan perubahan sosial. Selama keberhasilan industrialisasi dan strategi pertumbuhan sangat tergantung.

Elit politik lokal sangat mungkin dibatasi untuk posisi aktif atau tergantung pada struktur. Struktur yang ada diinterpretasikan secara berbeda oleh elit politik lokal dari berbagai kalangan. Terbuka terhadap kemungkinan. Elit politik lokal dari lingkaran tertentu dapat memberi makna pada struktur yang ada sebagai batasan, tetapi untuk lokal elit politik dari berbagai kalangan, struktur ini dimaknai sebagai pemberdayaan. Elit politik lokal adalah orang-orang yang menduduki posisi politik di wilayah lokal. Tren sejarah menunjukkan bahwa posisi mereka sebagai elit politik lokal mengalami naik turun seiring dengan perubahan yang terjadi. Orang yang mengalami pembatasan dari struktur yang ada pada suatu waktu mengubah nasibnya untuk mengalami pemberdayaan di lain waktu. Demikian pula beberapa dari mereka yang pertama kali mengalami pemberdayaan mengalami kendala struktural.

Joel S. Migdal (2004) berpendapat bahwa fenomena orang kuat lokal adalah hasil dari pengaruh terus-menerus dari orang-orang berpengaruh ditingkatkan lokal di bidang politik lokal. Pengaruh orang kuat lokal muncul dari pembentukan segitiga koordinasi yang dibentuk oleh aliansi orang kuat lokal dengan birokrasi negara di tingkatan lokal dan politisi di tingkat lokal. Orang kuat lokal mampu memosisikan diri mereka dalam masyarakat dengan sumber daya penting seperti tanah, pinjaman, dan pekerjaan. Orang-orang kuat lokal memiliki kemampuan untuk menjamin stabilitas politik di tingkat lokal dan melakukan kontrol sosial atas penduduk lokal dibuktikan dengan memiliki kemampuan untuk memobilisasi penduduk.

Vedi R. Hadiz (2010) juga menemukan fenomena "local influence people", lembaga politik lokal yang korup, dan beberapa kelompok otoriter di Asia Tenggara yang mengalami reformasi politik seperti Filipina, Thailand, dan Indonesia. Dengan slogan pemerintahan yang sangat baik, desentralisasi membuka jalan bagi kebangkitan dan integrasi orang kuat lokal. Bahkan, desentralisasi telah dibajak oleh kepentingan predator dan pengeksploitasi lokal. Ada beberapa pandangan umum tentang kekuasaan yang mungkin relevan ketika menganalisis interaksi kekuasaan antara elit

politik di tingkat lokal, terutama di perkotaan. Setidaknya ada dua hal yang perlu dianalisis. Pertama, aktivitas politik semua elit atau kelompok elit dalam memperebutkan sumber daya yang semakin langka, posisi dan posisi dalam masyarakat. Kedua, dalam perebutan kekuasaan politik, elit atau kelompok elit menghadapi dua kondisi: konflik dan konsensus. Di satu sisi, elit bergulat, bersaing dan melawan elit politik lainnya. Di satu sisi, juga memungkinkan kerjasama atau konsensus di antara elit politik. Terjadi negosiasi yang saling menguntungkan antar elite politik sehingga kebutuhan dan kepentingan masing-masing elite politik diperhitungkan.

METODE

Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah kualitatif. Peneliti lebih eksploratif dalam melakukan penulisan karena perbedaan pandangan yang luas akan posisi elit lokal di Desa Gunung Picung. Pengumpulan dan pengambilan data dilakukan secara Purposive, di mana narasumber di dapat atas rekomendasi dari kepala desa gunung picung yang kemudian berkembang untuk dilakukannya wawancara lanjutan kepada para elite lokal di Desa Gunung picung. Data yang diperoleh daripada elite lokal seperti pedagang, keluarga pemerintah dan pemuka agama yang ada di Desa Gunung Picung kemudian diuji validitasnya dengan menggunakan Teknik triangulasi data sumber, dalam proses wawancara penulis melakukan uji konfirmasi kepada setiap narasumber yang diwawancara.

HASIL DAN DISKUSI

Kuasa Patronase dan Klientelisme Kepala Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor Pada Pilkada Serentak Kabupaten Bogor Tahun 2018.

Kajian mengenai patronase secara spesifik menjelaskan mengenai materi yang diberikan dari patron kepada klien. Keragaman materi dalam kajian patronase dapat berupa uang, atau barang (untuk vote buying) atau dalam bentuk lain seperti pupuk, tempat ibadah, pembangunan jalan, pelayanan, peluang ekonomi dan lain sebagainya. Intinya dalam hubunga politik patron memiliki kedudukan yang lebih tinggi disbanding klien. Hal ini juga dapat disebut sebagai politik distribusi apabila patron memberikan hal yang bernilai ekonomis tinggi dan berkelanjutan seperti halnya proyek. Relasi yang terbentuk pada model patronase adalah bersifat personal, tidak setara dan informal (Aspinall & Sukmajati, 2014)

Pilkada serentak pada tahun 2018 telah dilaksanakan, sebanyak 171 daerah berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Tip O'Neill menyatakan bahwa, "*all politics is local*" yang dapat diartikan sebagai demokrasi di tingkat nasional akan

tumbuh berkembang dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dulu. Ini berarti kebangkitan demokrasi politik di Indonesia diawali dengan Pilkada langsung, karena pilkada termasuk upaya membangun pondasi demokrasi di aras lokal.

Saat ini, pemilihan kepala daerah berlogika: bagaimana para kandidat kepala daerah mampu mempengaruhi dan merebut hati masyarakat. Karenanya, ada beberapa hal yang baru dalam Pilkada yang diselenggarakan di Indonesia saat ini, selain kejelasannya mengenai ke-'langsung'-an pemilihan itu sendiri atau kebaruan akan arena permainan. Dibandingkan dengan pemiliha kepala daerah pada era-era sebelumnya, arena permainan sekarang berubah dari 'Politik Dalam Ruangan' menjadi 'Politik Luar Ruangan'. Ada beberapa hal yang menjadi pertaruhan 'Politik Luar Ruangan'. *Pertama*, pertaruhan mengenai munculnya politik uang. Persoalan ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, tetapi terjadi juga di negara-negara maju. Masalah politik uang hadir ketika pemilih menukarkan pilihannya dengan sejumlah uang dan/atau barang dari kandidat dan/atau partai untuk memilih calon kepala daerah. Seperti hal yang terjadi pada Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Bogor. Salah satu calon Bupati Bogor melakukan starategi '*Vote Buying*' dan tak lupa, praktik patronase dan klientelisme pun dilakukan.

Patronase sendiri sangat sering ditemukan di berbagai kegiatan politik. Patronase dilakukan untuk mendapatkan dukungan publik dan mendistribuksikan berbagai jaring keuntungan. Jaring keuntungan yang dimaksud ialah berupa uang tunai, jasa, barang dan berbagai keuntungan yang bersifat ekonomis lainnya seperti halnya pekerjaan, jabatan, proyek dan sebagainya. Sumber modal dari patronase biasanya berasal dari aktor politik tersebut namun tidak menutup kemungkinan pula partai politik terlibat di dalamnya. Selain itu, modal bisa berasal dari dana publik seperti proyek yang didanai oleh pemerintah (Shefter, 1977).

Jaringan posisi formal dan pertanggungjawaban dan sikap antara pemilih dengan elit politik bias dijalankan melalui aktor politik dan pejabat publik yang merancang kebijakan programatik beserta dengan capaian kebijakannya (Kitschlet, 2000). Selain itu, keterkaitan *money politic* dengan patron klien memungkinkan adanya jual beli suara di tingkatan yang lebih luas. Oman, Kepala Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, merupakan tuan tanah dan pengusaha toko bangunan yang memiliki tiga cabang di Desa Gunung Picung. Selain itu ada beberapa usaha lain yang dijalankannya, yaitu ternak ayam, ternak ikan, perkebunan, dan penjualan batu alam. Dengan kekuatan dalam bidang ekonomi, Oman dapat menjabat sebagai Kepala Desa dengan mengalahkan calon lain yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi dibanding beliau. Kekuatan dalam bidang ekonomi yang dimilikinya, membuat Oman mudah dalam menjalani kehidupan sosial di Desa Gunung Picung. Terlebih lagi, beliau merupakan orang nomor satu di Desa Gunung Picung ini. Dengan latar belakang ekonomi yang mumpuni dan jabatan yang tinggi, membuat

Oman dipercaya dapat mempengaruhi tindakan politik masyarakat Desa Gunung Picung untuk memilih salah satu calon Bupati Bogor pada Pilkada serentak tahun 2018.

AY, calon Bupati Bogor yang merupakan saudara kandung dari Bupati Bogor yang saat ini menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Sepak terjang AY di bidang politik sudah tidak diragukan lagi. Beliau pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor selama dua periode. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya di DPRD, AY memulai karier politiknya yang baru sebagai calon Bupati pada Pilkada tahun 2018.

Selanjutnya, karena merasa khawatir dengan jumlah suara yang diperoleh pada saat hari penghitungan suara, tim suksesnya dari AY mengunjungi Oman, Kepala Desa Gunung Picung yang merupakan orang kuat lokal di daerah tersebut. Oman dipercaya dapat membantu mendongkrak suara di Desa Gunung Picung. Dengan latar belakang ekonomi yang mumpuni dan jabatan yang tinggi, membuat Oman dipercaya dapat mempengaruhi tindakan politik masyarakat Desa Gunung Picung untuk memilih salah satu calon Bupati Bogor pada Pilkada serentak tahun 2018, yaitu AY.

Kemudian pada praktiknya, Oman melakukan pola persuasi menggunakan teknik *'Vote Buying'*. Hal tersebut pun dilakukan oleh kepala desa, dan lagi-lagi beliau mempengaruhi dan menguasai hak politik warga desa, yang kebanyakan adalah warga yang buta politik serta mempunyai kemampuan ekonomi yang lemah, dan tak lupa beliau mempengaruhi warga dengan praktik politik uang. Sehingga, dengan mudahnya kepala desa tersebut dapat mempengaruhi hak politik warga. Mengutip salah satu argumen Migdal tentang *local strongman*, "...Orang kuat lokal melakukan kontrol sosial dengan menyertakan beberapa komponen penting yang dinamakan "strategi bertahan hidup" penduduk setempat. Dengan kondisi seperti itu, orang kuat lokal bukan saja memiliki legitimasi dan memperoleh banyak dukungan di antara penduduk lokal, tetapi juga hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan para pemilih atas jasa yang diberikan. "

Praktik politik uang yang diproduksi oleh sistem patronase, melahirkan budaya hegemoni yang dilakukan oleh *local strongmen* terhadap masyarakat. Menurut Antonio Gramsci, hegemoni bukanlah dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Menurut Gramsci, pengertian hegemoni harus dibedakan dari bahasa asalnya dalam bahasa Yunani, yaitu penguasaan satu bangsa terhadap bangsa lain.

Sebenarnya, money politik dan kegiatan jual beli suara dapat diminimalisir dengan meningkatkan kualitas partai politik dan melakukan peningkatan pada kualitas identitas kepartaian. Identitas partai politik ialah komponen psikologis yang akan memberi sumbangan dan membuat dukungan menjadi lebih stabil. Kedepannya, identitas partai politik yang kuat akan membantu memperkuat demokrasi dan meminimalisir adanya kegiatan jual beli suara. Pendukung partai politik akan lebih

loyal dan tidak berorientasi pada materi semata. Namun, di Indonesia belum banyak pihak yang menyadari hal tersebut. Selama ini keterlibatan identitas partai hanya sebatas pada stabilitas dan instabilitas dukungan elektoral (Campbell, Converse, Miller, & Stokes, 1960)

Selanjutnya patron-klien, praktik ini biasanya ditandai dengan adanya penguasaan sumber daya politik oleh minoritas elit, terutama elit negara. Pada saat yang sama, tampak ketergantungan klien terhadap sumber daya tersebut. Alokasi dan distribusi berbagai sumber daya publik dikerahkan dalam bentuk pertukaran antara kedermawanan sang patron dengan loyalitas politik sang klien. Salah satu praktik patronase dan klientelisme terjadi saat Pilkada serentak Kabupaten Bogor 2018. Yang mana tim sukses salah satu Calon Bupati Bogor memanfaatkan Kepala Desa Gunung Picung yang merupakan *local strongman* di daerah tersebut, untuk memobilisasi massa di Desa Gunung Picung agar memilih salah satu calon Bupati Bogor. Patronase ini pastinya didistribusikan melalui jaringan klientelisme seperti tim sukses yang telah dipersiapkan jauh sebelum pemilihan yang kemudian melakukan konsolidasi dengan Kepala Desa untuk memenangkan calon Bupati tersebut. Kemudian hubungan yang dibangun di masyarakat oleh Kepala Desa yaitu mobilisasi suara melalui politik uang. Strategi tersebut merupakan cara untuk mendapatkan dukungan atau suara dengan cara tim sukses menjadi perantara untuk memobilisasasi suara di masyarakat.

Posisi Kepala Desa yang sentral sebagai *local strongmen* di Desa Gunung Picung ini sangat berpengaruh terhadap tindakan politik warga masyarakat Desa Gunung Picung. *Local Strongmen* adalah tokoh yang identik dengan kemampuan dan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Kemunculan *local strongmen* sebagai salah satu sumber kekuasaan yang dimiliki diantaranya adalah kekayaan yang dimiliki sebagai tuan tanah atau orang kaya. Dari sisi tersebut *local strongman* dipandang sebagai bos ekonomi, *local strongmen* memiliki kecenderungan mereka untuk menjadi investor Pilkada pada akhirnya dapat mempengaruhi proses desentralisasi yang terjadi di level lokal. Sebab memiliki pengaruh yang kuat, Kepala Desa Gunung Picung sebagai *local strongmen* di Desa Gunung Picung, beliau melakukan praktik politik uang untuk menghegemoni masyarakat sebagai hasil dari praktik patronase dan klientelisme.

Setelah Pilkada serentak tahun 2018 dilaksanakan, Pilkada Kabupaten Bogor berhasil dimenangkan oleh pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati AY-IS dengan perolehan suara sebanyak 912.221 atau 39 persen. Dapat dikatakan bahwa, mobilisasi massa tim pemenangan AY sangat berhasil dan berbuah manis. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa peran bapak Oman sebagai *local strongman* di Desa Gunung Picung sangat berpengaruh terhadap tindakan politik masyarakat desa tersebut. Jabatannya sebagai Kepala Desa, pengusaha di bidang ternak ayam, ternak ikan, perkebunan, jual-beli batu alam, serta dengan tiga cabang toko bangunan yang ia miliki dapat mengundang banyak perhatian dari banyak pihak.

Memang tidak dapat dipungkiri, kekuatan seseorang dalam bidang ekonomi mempunyai nilai tambah dibanding dengan orang-orang yang memiliki banyak kemampuan, namun sedikit materi.

Kesimpulan

Patronase mewujud karena adanya hubungan yang tidak setara tapi saling membutuhkan. Nilai-nilai yang mendasari hubungan patron-klien merupakan nilai-nilai yang kurang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan birokrasi. Sebab, hal ini bersebrangan dengan diaturnya hak politik individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhan haknya oleh Negara. ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, Pilpres, Pilkada, khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang seluas-luasnya bagi setiap individu atau warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, sebab pembatasan hak pilih warga negara dalam hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Rendahnya pendidikan politik warga masyarakat, terkhusus pada masyarakat Desa, menjadi hal krusial yang perlu dibenahi. Partai politik, sebagai organisasi nasional yang berkewajiban memberikan pendidikan politik secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka akan lahirlah pemilih rasional. Pemilih rasional adalah mereka-mereka yang memilih berdasarkan prinsip-prinsip kontrak politik atau kontrak sosial. Bagi para pemilih rasional, memilih merupakan upaya memberi kepercayaan kepada kandidat tertentu untuk merealisasikan visi, misi, dan program-program yang dicanangkan melalui mandat yang diberikan oleh para pemilih secara bertanggungjawab dan profesional.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan bahwa untuk membangun dan menjadikan transisi menuju demokrasi di Indonesia yang lebih bermakna. Kita harus selalu menyadari bahwa demokrasi harus diartikan sebagai sebuah proses yang berjalan terus menerus. Ini artinya bahwa demokrasi tidak dapat bekerja dengan lancar setelah ia dipasang pada suatu negara tanpa ada perawatan dan pemeliharaan. Upaya untuk membangun demokrasi yang baik di Indonesia memang terbilang sulit. Peran pemerintah memang penting, namun kontribusi masyarakat dalam upaya membangun demokrasi yang baik di Indonesia juga tak kalah pentingnya. Perubahan budaya menuju budaya egaliterian demokrasi tidak dapat dilakukan dalam hitungan hari, bulan atau satu sampai dua tahun saja, hal ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Ini memerlukan kesabaran untuk membangun nilai, norma, dan aturan baru bagi budaya plural dalam masyarakat heterogen di Indonesia.

REFERENSI

Jurnal:

- Agustino, Leo dan Fahurl, Sayed. (2018). Patronase dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018. *Journal of Governance*.
- Argenti, Gili. (2018). *Civil Society, Shadow State dan Local Strongmen* dalam Kajian Politik Lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Fauzi, Agus Mahfud. (2017). Hegemoni Pejudi Dalam Pilkada di Indonesia.
- Muhtadi, Burhanudin. (2013). Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia : Sebuah Bagian Awal Antara "Party:ID" dan Patron-Klien.
- Pratama, Rekha Adji. (2017). Patronase dan Klientelisme pada Pilkada Serentak Kota Kemdari tahun 2017. *Jurnal Wacana Politik*.
- Solissa, Marcelino. (2016) Fenomena Orang Kuat Lokal di Indonesia : Studi Kasus Tentang Kemunculan Keda dalam Eksploitasi Tambang Emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*.
- Zainal, Nur Aliyah dan Khaldum, Ibnu. (2017). *Local Strongmen* dan Kontestasi Politik (Studi terhadap Kemenangan Fenomenal Arras Tammauni dan Muh Amin Jasa pada Pilkada Mamuju Tengah 2015).

Internet:

- Fukuyama, F. (2012, May 08). Retrieved from theamericaninterest.com: <http://blogtheamericaninterest.com/fukuyama/2012/05/08/the-two-europes/>

Buku:

- Ahmad, Ikhsan. (2018). *Memahami Ilmu Politik*. . Serang : SUHUD Sentrautama.
- Agustino, Leo. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ahmad, Ikhsan. (2015). *Pilar Demokrasi Kelima : Politik Uang : Realitas Konstitusi Politik Uang di Kota Serang*. Yogyakarta : Deepublish.
- Aspinal & Sukmajati .(2015). *Politik Uang di Indonesia, Patronase dan Klientalisme Pada Pemilu Legislatif*. Yogyakarta: Polgov
- Campbell, A., Converse, P., Miller, W., & Stokes, D. (1960). *The American Voter*. New York: John Wiley&Sons.
- Kamdani dan Imam Baehaqi. Yogyakarta : INSIST bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.

- Kitschlet, H. (2000). Linkages between Citizens and Politicians in Democratic Polities. *Comparative Political Studies*.
- Nimmo, Dan. (2010). *Komunikasi Politik*. Penerjemah: Tjun Sujaman. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Perludem. (2011). *Reorganizing Pemilukada Arrangement*. Jakarta: Perludem.
- Shefter, M. (1977). *Party and Patronage: Germany, England and Italy*. England: Cornell University Press.
- Simon, Roger. (2014). *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Penerjemah: Kamdani dan Imam Baehaqi. Yogyakarta : INSIST bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Tjun Sujaman. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.